**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA AKSI
MITIGASI DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)
STUDI PADA DESA MOJODESO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

Hidayatun Ni'mah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
nikmah45@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos., M.AP

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Pemerintah membuat program kampung iklim (PROKLIM) untuk mencegah naiknya gas emisi rumah kaca serta mencegah dampak dari perubahan iklim dengan tindakan adaptasi dan mitigasi secara proaktif yang berkontribusi kepada upaya pembangunan nasional. Program ini melibatkan seluruh masyarakat desa/kelurahan yang menerapkan program maupun masyarakat desa yang terdampak atau tidak terdampak langsung pada bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan sampah pada aksi mitigasi dalam Program Kampung Iklim di Desa Mojodeso. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah proses pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, pemeliharaan. Subyek dari penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Mojodeso melalui kegiatan pengelolaan sampah dalam Program Kampung Iklim (PROKLIM) berjalan dengan baik. Proses pemungkinan, sudah dilakukan persiapan yang baik, dengan melakukan kegiatan studi banding dan pensosialisasian untuk memilah sampah. Proses penguatan dilakukan dengan memberikan pelatihan pembuatan daur ulang sampah, namun masyarakat masih minim menekuni daur ulang tersebut. Proses perlindungan, dilakukan dengan mengeluarkan SK kepada pihak pengelola sampah. Pada proses penyokongan, bimbingan dan dukungan sudah diberikan, namun belum ada dukungan alat transportasi pengangkut sampah di bank induk sampah. Sedangkan proses pemeliharaan sudah dilakukan dengan baik, dengan diadakan perlombaan lingkungan per RT setiap tahun. Sehingga peneliti memberikan saran yaitu perlu diberikan sosialisasi terus menerus untuk masyarakat mau mengelola sampah, melakukan pengimplementasian dari pelatihan yang sudah diberikan, mengundang pihak luar untuk memberikan pengetahuan lebih dalam tentang pengelolaan sampah dan membuat terobosan baru guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga pelaksanaan dari aksi mitigasi bisa terlaksana dengan baik.

Kata kunci : Proses Pemberdayaan Masyarakat, PROKLIM, Pengelolaan Sampah

Abstract

The government created a climate village program (PROKLIM) to prevent the increase of greenhouse gas emissions and prevent the effects of climate change with proactive adaptation and mitigation actions that contribute to national development efforts. This program involves all village / kelurahan communities who implement programs and village communities that are affected or not directly affected by disasters. The purpose of this study is to describe the process of community empowerment through waste management activities in mitigation actions in the Climate Village Program in Mojodeso Village. This study uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is the process of community empowerment which includes the possibility, strengthening, protection, advocacy, maintenance. The subjects of this study were determined by purposive sampling technique. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the empowerment of the Mojodeso Village community through waste management activities in the Climate Village Program (PROKLIM) went well. The possible process, good

preparation has been carried out, by conducting comparative study and socialization activities to sort waste. The strengthening process is carried out by providing training in making waste recycling, but the community is still minimal in pursuing recycling. The protection process is carried out by issuing a decree to the waste management party. In the process of refinement, guidance and support have been given, but there is no support for the transportation of garbage transporters in the garbage master bank. While the maintenance process has been done well, with an environmental race held per RT every year. So that researchers provide advice, namely that they need to be given continuous socialization for the community to manage waste, implement the training provided, invite outsiders to provide deeper knowledge about waste management and make new breakthroughs to increase community participation in waste management, so that the implementation of mitigation actions can be carried out well.

Keywords: Community Empowerment Process, PROKLIM, Waste Management

PENDAHULUAN

Pembangunan masih menjadi salah satu masalah yang kompleks dalam kehidupan. Dilihat dari berbagai bidang, misalnya aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Pada era seperti ini sudah saatnya menjadikan masyarakat sebagai aktor pembangunan. Aktor pembangunan berarti masyarakat harus mempunyai andil serafit berperan aktif dalam rangka menyukseskan pembangunan. Salah satu strategi yang tepat serta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yaitu dengan cara memberdayakan masyarakat (Cholisin, 2011:1). Gito Saputro dan Kordiyana (2015:55) menerangkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang mengembangkan dan menguatkan kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri.

Sebagai salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia sangat berkepentingan dalam usaha penanggulangan pemanasan global dan perubahan iklim. Upaya menanggulangi permasalahan perubahan iklim tidak bisa terlepas dari pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya akan lebih mudah untuk diajak menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), pengentasan kemiskinan (*pro-poor*), dan pembukaan lapangan kerja (*pro-job*); dipadukan dengan pembangunan berwawasan lingkungan (*pro-environment*) harus dijadikan landasan utama pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Dampak dari perubahan iklim dalam pembangunan nasional mengakibatkan kenaikan dan perubahan suhu serta mengurangi sumber daya alam dan menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Berubahnya paradigma pembangunan nasional kearah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan pembangunan. Pemberdayaan merupakan salah satu kata yang sering muncul dalam ungkapan perbincangan tentang pembangunan.

Dalam Pasal 70, UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat dapat berperan aktif dengan cara meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh kembangkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, serta mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan di bumi.

Salah satu upaya pemerintah menindaklanjuti perubahan iklim yang saat ini terjadi. Pemerintah membuat sebuah program yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk- Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (PROKLIM). Program Kampung Iklim (PROKLIM) merupakan program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong seluruh pihak aktif dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK.

Komponen kegiatan PROKLIM meliputi upaya adaptasi dan mitigasi antara lain :

- a. Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
- b. Peningkatan ketahanan pangan;
- c. Pengendalian penyakit terkait iklim;
- d. Upaya mitigasi berupa pengolahan sampah, limbah padat dan cair;
- e. Penghematan energi;
- f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dan;
- g. Kegiatan – kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Pelaksanaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) sudah sebagian dilaksanakan di desa maupun kelurahan dalam Provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu yang sudah menerapkan PROKLIM, yang menunjuk ke sebagian desa maupun kelurahan di kabupaten yang tersebar untuk

pengusulan Program Kampung Iklim (PROKLIM). Salah satu Kabupaten yang sudah menerapkan Program Kampung Iklim (PROKLIM) adalah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur, terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 419 desa dan 11 kelurahan. PROKLIM sudah diterapkan di beberapa desa di kabupaten Bojonegoro. Adapun desa yang mengajukan PROKLIM adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Desa yang mengajukan PROKLIM

Nama Desa	Kecamatan
Mojodeso	Kapas
Ngringinrejo	Kalitidu
Pilanggede	Balen
Baureno	Baureno

Sumber : Data primer DLH Kab. Bojonegoro

Dari beberapa desa tersebut Salah satu desa yang ditunjuk untuk menerapkan PROKLIM yaitu Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Desa Mojodeso merupakan salah satu desa yang sudah menjalankan aksi dalam hal pengelolaan lingkungan dan desa pertama yang memperoleh penghargaan dan menjadi *pioneer* di Kabupaten Bojonegoro . Walaupun desa Mojodeso bukan sebagai desa yang terdampak iklim secara langsung, karena memang konsep PROKLIM tidak hanya difokuskan pada kampung-kampung yang terkena perubahan iklim saja.

Beberapa kegiatan aksi perubahan iklim yang sudah dilakukan, salah satu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada kegiatan pengelolaan sampah dalam aksi mitigasi. Sampah merupakan permasalahan yang dianggap remeh oleh sebagian masyarakat di dunia ini. Bertambahnya jumlah penduduk serta berubahnya pola konsumsi masyarakat, maka sampah yang dihasilkan manusia juga meningkat, sehingga tidak mengherankan jika produksi sampah dari tahun ke tahun semakin bertambah.

Masalah sampah yang ada di Mojodeso memang sudah dilihat secara fisik tidak ada masalah. Tetapi masih ditemukan masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah. Mereka masih mencuri aksi dalam pembuangan sampah masih dicampur dan masih melakukan pembakaran sampah. Sesuai dengan penuturan Bapak Abdul Mu'in sebagai ketua PROKLIM desa Mojodeso:

“kalau urusan sampah ya mbak, sampean bisa dilihat sendiri disungai-sungai sudah bersih, warga sudah memilahnya mbak. Tetapi kalau untuk masalah ada orang yang tidak memilahnya dan membakar sampah, ya masih ada mbak. Itu tergantung kesadaran mereka sendiri mbak, ya kadang masih dicampur mbak”. (wawancara pada tanggal 3 Januari 2019, pukul 10.00 WIB).

Selain permasalahan itu, volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Mojodeso terbilang semakin

bertambah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan pak Adib selaku perangkat desa dan kelompok pengelola sampah:

“iya mbak volume sampah di Mojodeso ini semakin bertambah, karena sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) di desa biasanya di angkut 2 minggu sekali sekarang diangkut seminggu sekali mbak, ya karena sudah ndak muat mbak” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 13.00 wib).

Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa sampah yang dihasilkan masyarakat Mojodeso semakin bertambah volumenya, yang dibuktikan dengan diangkutnya sampah yang ada di TPS Mojodeso oleh DLH BOJONEGORO yang biasanya setiap 2 minggu sekali, sekarang dilakukan setiap seminggu sekali. Pengangkutan tersebut dikarenakan sampah yang dihasilkan masyarakat Desa Mojodeso semakin bertambah dan tempat container yang ada di TPS Mojodeso sudah penuh menampung sampah tersebut.

Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syifaul Muhash Shonah (2013: 2) bahwa pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas merupakan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi timbunan sampah yang bertambah setiap harinya, yaitu dengan pengelolaan sampah tingkat rumah tangga. Selain itu, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Reza Rinaldy,dkk (2017:7). Penelitian yang dilakukan 7 tahapan yaitu tahapan engagement, assessment, perencanaan program, Implementasi, dan terminasi. dengan hasil penelitiannya yaitu kegiatan pengembangan masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam program bank sampah ini sudah dikatakan cukup baik meskipun hambatan banyak datang dari internal maupun eksternal. Hambatan datang dari sulitnya proses pemasaran produk dan manajemen organisasi terutama terhadap SDM dalam pelaksanaan kegiatan.

Dari masalah tersebut, pemerintah desa Mojodeso melakukan kegiatan dengan upaya memberdayakan masyarakat untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan. Kegiatan tersebut berupa pembentukan bank sampah, pembuatan pupuk kompos, serta kegiatan daur ulang sampah. Kegiatan tersebut untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang sebagai solusi pengurangan sampah. Pola pikir masyarakat diarahkan pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Pengelolaan Sampah pada Aksi Mitigasi dalam Program Kampung Iklim (PROKLIM) (Studi pada Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro)”**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah Proses pemberdayaan Masyarakat menurut Suharto (2010:67-68) yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan sampah pada aksi mitigasi dalam Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Desa Mojodeso dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono (2015: 246) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan deskripsi proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan sampah pada aksi mitigasi dalam Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Desa Mojodeso dengan menggunakan teori Suharto (2010: 67-68) yang terdiri dari pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Berikut merupakan uraian tahapan tersebut :

1. Pemungkinan

Proses pemungkinan yang dilakukan untuk menciptakan iklim yang kondusif yang memungkinkan mengembangkan potensi masyarakat secara optimal. Dalam persiapan awal, sudah dilakukan dengan baik, ketersediaan fasilitas juga sudah diberikan, didukung dengan persiapan petugas dalam melaksanakan proses pemberdayaan.

Namun dalam observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya ditemukan bahwa, dalam perjalanan kegiatan bank sampah yang dimiliki setiap lingkungan, belum berjalan secara terus menerus, memang masyarakat masih melakukan kegiatan penyetoran sampah ke bank sampah lingkungan, tetapi tidak semua pengelola bank sampah lingkungan menyetor kumpulan sampah ke bank sampah induk. Mereka memilih menjual ke pengepul luar atau tukang rosok keliling dengan alasan harga jual yang diberikan lebih tinggi, menurut sebagian warga harga yang ditetapkan oleh bank sampah induk sampah lebih murah daripada pengepul sampah dari luar, referensi harga yang diterapkan pada bank sampah induk bisa dilihat pada olehalaman lampiran.

Selain itu, kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah kurang dibekali dengan pengetahuan tentang jenis-jenis sampah yang layak di daur ulang dengan sampah yang bisa dimanfaatkan sebagai kompos, maupun yang bisa disetor ke bank sampah lingkungan. Sesuai dengan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat rata-rata masih enggan untuk memilah sampah plastik

dan kertas yang bisa di setor ke bank sampah lingkungan, mereka masih membuangnya begitu saja di tong sampah jenis non organik dan masih banyak ditemukan sampah plastik yang tercampur dengan sampah lain, dengan alasan karena harga jenis sampah plastik dan kertas sangat murah sehingga untuk pengumpulan sampah tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan, plastik dan kertas tersebut masih bisa di jadikan kerajinan daur ulang sampah.

Hal lain, bahwa semua kegiatan pengelolaan lingkungan khususnya berkaitan dengan sampah sudah didukung dengan ketersediaan fasilitas memadai yang diberikan oleh desa agar masyarakat tidak merasa terbebani akan adanya anjuran untuk pemilahan sampah secara mandiri, hal ini menjadi langkah awal dalam pengkondisian potensi masyarakat agar lebih berkembang dalam menghadapi permasalahan sampah.

2. Penguatan

Proses penguatan di lakukan dengan menambah pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah. Proses penguatan tersebut terlaksana sesuai dengan esensi PROKLIM, bahwa dalam PROKLIM tidak ada kegiatan apapun yang melakukan pembakaran sampah. Namun, terlihat dari hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan beberapa masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah oleh mereka yang kurang peduli dengan lingkungan. dengan alasan masyarakat tersebut masih memiliki lahan yang luas dibelakang rumah maupun tidak ada tempat sampah untuk organik dan non organik di depan rumah mereka. Dari sini bisa dilihat bahwa kesadaran masyarakat desa Mojodeso tentang larangan pembakaran sampah masih belum optimal.

Dari observasi peneliti menemukan bahwa, hanya beberapa masyarakat mau dan mampu mengembangkan kreatifitas mereka dengan memproduksi suatu kerajinan yang bisa dikatakan layak untuk bersaing dengan produk-produk hasil buatan pabrik. Permasalahan tersebut dikarenakan tidak semua warga masyarakat mengikuti pelatihan daur ulang serta kurangnya percaya diri dengan hasil mereka. Kegiatan daur ulang ini bertujuan untuk menjaga lingkungan desa agar tidak tercemar, selain itu, sebagai pengisi waktu luang khususnya ibu-ibu rumah tangga yang notabene tidak sedang bekerja diluar rumah. Dari temuan tersebut, dinilai partisipasi masyarakat dalam proses pendaur ulangan sampah masih belum berjalan dengan optimal. Sehingga proses penguatan yang dilakukan oleh pihak desa Mojodeso belum dilakukan sesuai proses pemberdayaan masyarakat menurut Suharto.

Selain itu, Pengolahan sampah yang dilakukan oleh Desa Mojodeso masih dilakukan pada tahap pengumpulan dan penyetoran ke pengepul besar. Belum ada kegiatan pemrosesan akhir sampah yang bisa dimanfaatkan untuk bahan energi. Dalam proses penguatan pemberian pengetahuan pengolahan ke

proses akhir sampah masih dalam tahap percobaan karena dalam kalkulasi bahan belum mencukupi modal awal dengan keuntungan yang diperoleh jika penerapan bahan energi dari sampah tersebut diterapkan, masih butuh persiapan yang matang untuk memulai hal tersebut.

3. perlindungan

Proses perlindungan berarti melindungi masyarakat terutama kelompok yang lemah agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang yang harus diarahkan untuk menghapus segala jenis diskriminasi. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak berwenang untuk para kader pengelolaan lingkungan khususnya kader sampah, yang bertujuan agar mereka lebih merasa diakui dan terlindungi dalam menjalankan tugas.

Perlindungan diberikan berupa dikeluarkan SK tentang pembentukan bank sampah, pembentukan kelompok daur ulang sampah, maupun pembentukan kader lingkungan yang disahkan oleh Kepala Desa Mojodeso. perlindungan tersebut sudah dilakukan dengan baik dengan melindungi masyarakat yang tergabung dalam kelompok daur ulang sampah maupun pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan pengelolaan sampah. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa masyarakat Desa Mojodeso rata-rata merasa sudah senang dan antusias dengan adanya kegiatan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat yang masih tergolong lemah semakin termotivasi untuk sama-sama maju dengan adanya perlindungan yang sudah diberikan oleh Desa. Dengan tujuan masyarakat merupakan pokok utama dari subjek keberhasilan terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah.

4. Penyokongan

Upaya penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat agar mau menjalankan tugas dan perannya masing masing. Penyokongan dalam tahap ini yaitu bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan sampah yang sudah dipilah dan diolah.

Penyokongan yang diberikan pihak desa bersama DLH kabupaten Bojonegoro sudah dilakukan dengan baik, bisa dilihat dengan upaya pemanfaatan dari pengelolaan sampah sehingga bisa teratasi sampah tersebut. Salah satunya dengan adanya bantuan berupa TOSA untuk pengangkutan sampah yang dibawa ke TPS, tetapi dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti masih belum tersedianya fasilitas berupa kendaraan yang khusus untuk proses penyetoran sampah ke bank sampah Induk, alasan tersebut karena belum ada penganggaran yang dilakukan desa untuk memenuhi penyediaan kendaraan. Dari penyokongan tersebut bisa dikatakan sudah dilakukan dengan baik bahwa mereka sudah mampu menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik.

Dari hasil observasi maupun wawancara peneliti menemukan hal menarik dari pemanfaatan kegiatan

pengelolaan sampah. Bahwa dalam kegiatan tersebut bukan hanya dilakukan oleh para pengrajin daur ulang sampah melainkan dari sisi program lain desa Mojodeso, menjadikan kegiatan pengelolaan sampah sebagai wisata edukasi bagi pihak sekolah maupun perguruan tinggi yang menginginkan berkunjung ke Desa Mojodeso. Hal ini menjadikan kegiatan pengelolaan sampah menjadi tidak sia-sia, masyarakat bisa berbagi ilmu yang dimiliki tentang pemanfaatan sampah tersebut juga memperoleh tambahan pendapatan dari kegiatan wisata edukasi. Bukan hanya itu penyokongan yang sudah diberikan juga mampu mendongkrak penjualan hasil daur ulang sampah sebagai buah tangan dari kunjungan wisata edukasi di Desa Mojodeso.

Hal itu sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2014:22) yaitu tujuan perbaikan pendapatan (*better income*) dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya. Namun dalam bimbingan mengenai pemasaran produk tersebut masih menemui kendala yang belum bisa melampui pasar nasional maupun pasar internasional, dikarenakan bahwa mereka masih belum mampu secara maksimal memanfaatkan sosial media untuk tempat promosi yang efisien dan efektif. Pemasaran tersebut masih dilakukan melalui etalase di rumah Ibu Parni dan sebagian dilakukan apabila ada pameran pada kegiatan Desa maupun dari pameran yang diselenggarakan oleh pihak dari Kabupaten Bojonegoro.

Bukan hanya itu, berbeda dengan desa yang lain, masyarakat juga merasakan manfaat pengelolaan sampah organik yang dijadikan pupuk kompos yang bisa dinikmati oleh warga yang mempunyai lahan persawahan yang di Desa Mojodeso dengan diberikan gratis pupuk Kompos sebesar 1 ton/hektare sawah, bukan hanya diberikan kepada masyarakat desa Mojodeso, namun luar desa yang mempunyai lahan pertanian di Desa Mojodeso.

Pemanfaatan pupuk kompos yang ada di Desa Mojodeso dikatakan belum maksimal. Program pupuk kompos baru sebatas membuat pupuk kompos itu dijual untuk umum dan di distribusikan gratis kepada petani Desa Mojodeso sebesar 1 ton per hektare sawah. Selain itu, masyarakat desa Mojodeso sebagian besar belum menggunakan pupuk kompos sebagai pemupukan di lahan persawahan, mereka masih menggunakan pupuk kimia sebagai bahan pemupukan, bantuan pupuk organik hanya digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan pupuk mereka. Sebagian besar masih menggunakan pupuk kimia karena mereka beranggapan bahwa pupuk kimia hasilnya masih jauh lebih memuaskan. Tetapi dalam esensi PROKLIM, penggunaan pupuk kompos sangat dianjurkan, karena bisa membantu menyuburkan tanah dan mengembalikan ekosistem yang berada di dalam tanah, sehingga lingkungan tetap terjaga dengan adanya pemakaian pupuk organik. Perbandingan perolehan hasil panen memang ada,

tetapi kualitas lingkungan yang terjadi sangat berbeda jauh, dilihat dengan keadaan tanah masih gembur jika menggunakan pupuk kompos. Bisa disimpulkan bahwa penggunaan pupuk organik belum maksimal dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan pupuk organik sangat rendah.

5. Pemeliharaan

Dalam konsep ini sama dengan tahap evaluasi, sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas pemberdayaan yang sedang berjalan dengan membangun komunikasi dan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengadakan perlombaan rutin berbasis lingkungan setiap tahun yang bernama **“GERBANG MOJODESO BERTIAS”**. Perlombaan diadakan pada bulan kemerdekaan yaitu bulan agustus setelah upacara peringatan HUT RI. Perlombaan diadakan selama 4 hari berturut-turut dengan kombinasi acara pameran dengan menunjukkan hasil kreativitas dari masing-masing lingkungan atau Rukun Tetangga.

Proses pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojodeso sudah dilakukan dengan baik, kesimpulan tersebut dilihat dari hasil observasi peneliti yaitu Desa Mojodeso merupakan salah satu desa yang terindang, bersih, dan bebas dari tumpukan sampah yang biasanya masih terdapat disepanjang jalan Desa. Dari hasil penelitian berupa dokumentasi terlihat cukup jelas bahwa keadaan Desa Mojodeso menjadi desa yang tatanan lingkungan yang baik.

Pemeliharaan dilakukan agar masyarakat mau melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah juga melalui kegiatan ajaksanaan maupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan bergantian setiap RT, di sela-sela sambutan, pemerintah desa menyampaikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa dan mengingatkan bahwa kegiatan khususnya pengelolaan sampah yang sudah dilakukan akan selalu dijaga dan melaksanakannya secara berkelanjutan. Walaupun kegiatan tersebut dilakukan, namun faktanya dalam lapangan masih ada beberapa masyarakat yang masih enggan akan anjuran pemerintah desa, tetapi banyak masyarakatnya mulai sadar akan pentingnya mengelola sampah dan menjaga lingkungan desanya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemberdayaan yaitu perbaikan masyarakat, yakni mengubah kehidupan yang lebih baik yang didukung dengan lingkungan yang lebih baik dan diharapkan akan terwujud masyarakat yang lebih baik pula.

Dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan dari hasil wawancara maupun observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa pemerintah desa Mojodeso bersama masyarakat mampu melakukan pemeliharaan dengan cara berbeda dengan desa lain yaitu berupa perlombaan rutin yang dilakukan setiap tahun selesai peringatan upacara kemerdekaan. Hal ini jelas belum ada yang menerapkan konsep kegiatan yang serupa dengan desa Mojodeso. Hal ini menjadikan ciri khas Desa Mojodeso dalam upaya

kegiatan adaptasi maupun mitigasi dengan membuat sebuah terobosan baru agar masyarakatnya mau berfikir cepat dan tepat terhadap dampak perubahan iklim yang bisa kapan saja terjadi.

Hasil dari manfaat pemeliharaan menjaga lingkungan khususnya dengan kegiatan pengelolaan sampah, maka Desa Mojodeso memperoleh penghargaan tingkat Nasional dalam bidang lingkungan salah satunya yaitu Program Kampung Iklim (PROKLIM) dengan Kategori Utama yang berarti hasil akhir dari penilaian lebih dari 81%, disisi lain sesuai dengan manfaat adanya PROKLIM yaitu Desa Mojodeso sudah memberikan distribusi dalam pencapaian penurunan emisi GRK pada tahun 2020, walaupun Desa Mojodeso bukan termasuk kawasan industri, namun sudah mampu melakukan kegiatan adaptasi maupun mitigasi terkait perubahan iklim.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil analisis mengenai pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan sampah dalam Program Kampung Iklim di Desa Mojodeso dari penjelasan sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut: hasil penelitian dari proses pemungkinan sampai pemeliharaan sudah dilakukan secara optimal oleh pemerintah desa dengan tujuan agar masyarakat mau memperdulikan lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah sehingga bisa menjadi mandiri, namun masih perlu ditingkatkan pada proses penguatan dan penyokongan agar kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan lebih optimal dan upaya mitigasi perubahan iklim bisa dilakukan dengan baik.

SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti memberikan saran terkait pemberdayaan masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai di Desa Plandaan sebagai berikut :

1. Perlu diberikan sosialisasi yang terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat terhadap pemilahan sampah, bank sampah dan pemanfaatan sampah.
2. Perlu dilakukan pengimplementasian lebih lanjut atas pelatihan yang sudah diberikan pihak desa kepada masyarakat untuk melibatkan banyak partisipasi masyarakat, selain itu juga harus didukung dengan pengetahuan lebih dalam dengan mengundang atau bekerjasama dengan pihak lain seperti LSM, BUMN untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pengolahan sampah.
3. Penggunaan dan pemanfaatan pupuk kompos yang belum maksimal, perlu memberi peringatan kepada masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah organik, atau bisa mengurangi dengan cara menguburnya di tanah sehingga bisa terurai dan bisa dijadikan kompos.
4. Perlu membuat terobosan baru guna menarik partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan bank sampah, misalnya memberikan harga lebih tinggi daripada pengepul luar.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
- b. Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing dan yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- c. Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. dan Galih Wahyu Pradana S.AP., M.Si selaku dosen penguji.
- d. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholisin. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah disajikan dalam Gladi Manajemen Pemerintah Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan, di Lingkungan Kabupaten Sleman.
- Pasal 70, UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHKSETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim.
- Rinaldy, Reza,dkk.2017.Proses Community Development Pada Program Kampung Iklim Di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Program Bank Sampah Dalam Program Kampung Iklim). Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Jurnal Penelitian & PKM Juli 2017 Vol 4, No: 2
- Saputro, Gito & Rangga Kordiyana, 2015. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otoda , Yogyakarta: Graha Ilmu
- Shonah, Syifaul Muhash. 2013. Proses Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas (studi pada bank sampah Pitoe Kelurahan Jambangan, Surabaya. Skripsi.Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.Vol 1, No :2
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta
- Suharto,Edi.2010. Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Bandung:Alfabeta.
- Mardikanto, Totok.2015. *CSR (Corporate Social Responsibility)*(Tanggungjawab Sosial Korporasi).Bandung:Alfabeta